

Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)

Nuzul Wahyuni¹, Dr. Arik Susbiyani, M.Si.², Ibna Kamelia Fiel Afroh, SE.,MM³
Universitas Muhammadiyah Jember; Jl. Karimata No. 49 Kec. Sumbersari, Kota Jember,
Indonesia, Telp (0331) 336728/Fax (0331) 337957
¹²³Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Jember
e-mail: nuzulwahyuni68@gmail.com

ABSTRAK

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Adanya tuntutan ini hasil dari Undang-Undang No.6 Tahun 2004 tentang desa. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat desa terkait pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, yang berjumlah 10 desa. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 30 responden yang ditentukan menggunakan metode *non-probability sampling* yaitu *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada akuntabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Dana desa, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas

ABSTRACT

Good governance is one of the demands of society that must be met. The existence of this demand is the result of Law Number 6 of 2004 concerning villages. The purpose of this study was to obtain empirical evidence of the influence of competence and internal control systems on the accountability of village fund management. The accountability of village fund management is the responsibility of the village government to the village community regarding the management of village funds. This research was conducted in Besuki Subdistrict, Situbondo District, totaling 10 villages. This research data collection technique using a questionnaire with the number of respondents as many as 30 respondents who were determined using a non-probability sampling method, namely purposive sampling. The data analysis technique used multiple linear regression test. The results of this study indicate that competency and internal control systems have a positive effect on the accountability of village officials in managing village funds.

Keywords: Village Fund, Competence, Internal Control System, Accountability

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan perkembangan akuntansi sektor publik yang pesat dibuktikan dengan adanya era reformasi maka dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan tentang kewenangan daerah otonomi untuk mengurus dan mengatur kepesntingan masyarakat sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah suatu agenda utama dalam pembangunan nasional dengan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Indonesia menjadi negara maju, mandiri, dan demokratis salah satunya dengan cara meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan serta pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa inilah yang menjadi langkah awal Desa untuk menunjukkan kemandiriannya dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Adanya pengawasan ketat yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan jumlah dana desa yang diterima selalu meningkat setiap tahun, maka dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan Perangkat Desa yang berkompeten dan Sistem Pengendalian Internal yang baik serta sarana dan prasarana lain yang mendukung dan memadai agar pengelolaan Dana Desa menjadi akuntabel dan optimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjelaskan tentang proses pengelolaan dana desa yang dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pembuatan laporan, serta pertanggungjawaban Selain itu dijelaskan juga bahwa semua proses pengelolaan dana desa harus didasari oleh tiga asas yaitu asas transparansi, asas akuntabel dan asas partisipatif. Dalam pengelolaan Dan Desa ada sebuah tuntutan yang harus dicapai dan dimiliki oleh suatu aspek tata pemerintahan dimana salah satu pilarnya adalah Akuntabilitas. Untuk mengetahui berhasil tidaknya akuntabilitas dalam sebuah pemerintahan ada banyak faktor yang dapat memengaruhi aspek tersebut (*Cheng, R. H, 2002*).

Salah satu faktor paling penting dalam sebuah organisasi pemerintahan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) sebab dari kinerja merekalah dapat dinilai berhasil atau tidaknya suatu organisasi atau lembaga pemerintahan dalam mencapai tujuannya. Tinggi rendahnya kompetensi yang dimiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintahan, akan menentukan kualitas dari organisasi tersebut. Kompetensi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 10 dijelaskan sebagai kemampuan kerja pada setiap individu yang memncakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standart yang ditetapkan.

Agar tercapai akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pembuatan laporan serta pertanggungjawaban harus dilakukan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien. Oleh karena itu, selain kompetensi yang baik juga dibutuhkan sebuah sistem yang dapat memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatann pemerintah dapat berjalan dengan baik dibuktikan dengan melaporkan laporan keuangan secara andal, mengamankan aset serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan Undang-Undang yang ditetapkan agar tujuan tercapai. Sistem ini biasa disebut dengan Sistem pengendalian Internal. Sistem Pengendalian Internal menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah prose yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai demi tercapainya tujuan organisasi. Sistem Pengendalian Internal yang dikelola

dan dijalankan dengan baik akan dapat memengaruhi sistem pengambilan keputusan Pemerintah Desa sehingga berimplikasi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa.

Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menjelaskan masalah utama dalam pengelolaan dana desa terjadi karena rendahnya pengetahuan Perangkat desa ketika mengelola dan membuat laporan keuangan sehingga berpeluang menyebabkan terjadinya penyelewengan atau tindak korupsi (Abidin, 2015). Bambang Priyanto selaku Kepala Insektorat mengatakan pengelolaan dana desa di Situbondo masih lemah, karena para Kepala Desa di Situbondo diketahui masih banyak melakukan kesalahan akibat dari ketidakpahaman. Sedikitnya ada 9 Kepala Desa se-Situbondo yang menjalani pemeriksaan terkait penggunaan dana desa yang bermasalah terkait penyelesaian SPJ penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018 (BPK Jatim, 2019). Hal tersebut terjadi lantaran lemahnya pemahaman para kepala desa dalam mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Pemkab Situbondo. Oleh karena itu, para kepala desa di Kabupaten Situbondo masih butuh pembinaan untuk mengelola anggaran Dana Desa dan Dana Desa secara baik dan benar (Faktual News, 2019).

Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dipilih menjadi objek penelitian ini dikarenakan Kecamatan Besuki merupakan salah satu unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Situbondo, selain itu juga sebagai Kecamatan penerima Dana Desa terbesar di Kabupaten Situbondo yang mengemban tugas dan tanggung jawab yang besar baik dalam Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hasil audit Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) Kabupaten Situbondo, Permasalahan yang pernah terjadi di Kecamatan Besuki adalah kesalahan administrasi dalam mengelola tanah kas Desa yang disewakan tanpa melalui prosedur yang benar yang pernah terjadi di Desa Langkap dan Desa Demung Kecamatan Besuki, walaupun telah diselesaikan dengan pengembalian. Kedua Kepala Desa yang mengembalikan uang hasil tindak korupsi tanah kas desa yakni, Kepala Desa Demung, Yudi Suryanto mengembalikan uang sebesar Rp 680.302.187, sedangkan Kepala Desa Langkap, Agus Suhartono mengembalikan uang sebesar Rp 127.500.000 (Faktual News, 2019).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, peneliti akan melakukan penelitian agar mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa dengan judul penelitian “Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)”.

Tinjauan Pustaka

Desa

Desa adalah bagian yang penting dari suatu masyarakat yang mana tak dapat terpisahkan. Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu *deca* yang memiliki arti tanah asal, tanah air atau tanah kelahiran. Dijelaskan didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah demi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

masyarakat (Maria, 2002). Jika ditinjau dari Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 dijelaskan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa serta pengatur kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Dana Desa

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang ber sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan. Dana desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk Desa. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan angka kemiskinan, jumlah penduduk, tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah. Secara umum dijelaskan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Hal ini selaras dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 93/PMK.07/2015 mengamanatkan penggunaan Dana Desa penggunaannya diutamakan untuk pemberdayaan masyarakat serta pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Akuntabilitas

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan tindakan dan kinerja yang dilakukan seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak atau yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa merupakan tanggung jawab atau kewajiban untuk memberikan jawaban atau pertanggungjawaban setiap keperluan dana, dengan cara menjelaskan suatu kinerja atau kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa dalam memperoleh tindakan seseorang badan hukum perusahaan dan mencakup kumpulan organisasi dari setiap pihak yang bersangkutan untuk menghindari kegiatan penyelewangan.

Kompetensi

Secara etimologi istilah kompetensi berasal dari kata bahasa Inggris “competency” yang artinya kecakapan atau kemampuan. Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan, pada konteks manajemen sumber daya manusia arti dari kompetensi mengacu pada karakteristik seseorang yang akan membuat orang tersebut berhasil dalam pekerjaannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 Ayat 10 menjelaskan bahwa kompetensi merupakan kemampuan kerja pada setiap individu yang terdiri dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengertian kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa

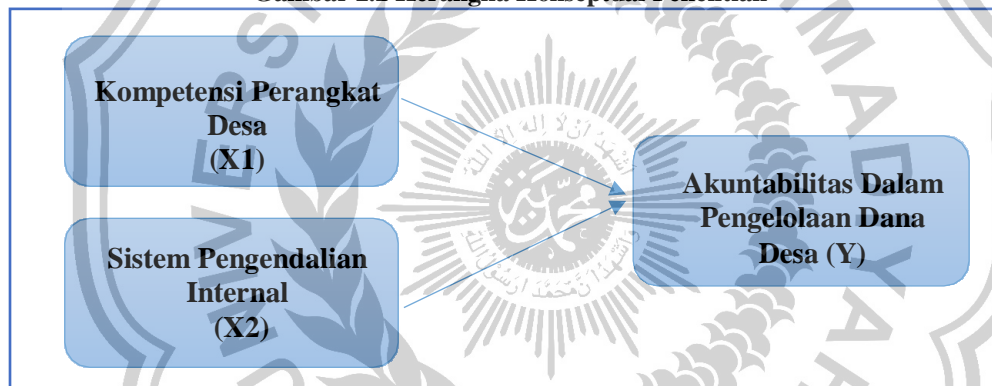
Indonesia (2002) adalah kecakapan, mengetahui, berwenang, dan berkuasa memutuskan atau menentukan atas sesuatu.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah dijelaskan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan adanya pengendalian internal yang baik diharapkan dapat menjadikan kondisi lingkungan kerja terkontrol sehingga dapat mengurangi kesalahan seseorang dalam menjalankan pekerjaan atau tugasnya.

Kerangka Konseptual

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian



Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa

H1 : Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa

H2 : Kompetensi Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian kausalitas. Menurut Sugiyono (2018) Penelitian Kausalitas adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis Data

Data kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Participant Observation adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, artinya peneliti secara langsung ikut serta dalam kegiatan suatu objek penelitian. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner. Penelitian ini menggunakan Skor *Skala Likert 1-5*.

Teknik Pengambilan Sampel

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipejari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang berada di setiap desa di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo yang berjumlah 116 orang yang tersebar di 10 Desa yaitu : Desa Widoropayung, Desa Langkap, Desa Blimbing, Desa Sumberejo, Desa Jetis, Desa Pesisir, Desa Demung, Desa Besuki, Desa Bloro dan Desa Kalimas.

Sampel

Sampel adalah sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *non probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018). Penentuan responden dengan jumlah Desa sebanyak 10 Desa ialah ditentukan masing-masing Desa terdapat 3 responden yang memenuhi kriteria yang ditentukanyaitu 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 Orang Bendahara Desa, sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 30 orang.

Teknik Analisis Data

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk menganalisis data sudah dikumpulkan dengan cara mendeskripsikan obyek yang diteliti melalui sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2018).

Pengujian Instrumen

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk memngukur kesahihan atau valid tidaknya suatu kuesioner (Setianal, 2017). Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *one shoot methode* dengan bantuan program SPSS. Apabila nilai r hitung $>$ r tabel maka dinyatakan valid.

Uji Reabilitas

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu instrumen apabila dilakukan pengukuran berulang-ulang akan tetap memberikan hasil yang konsisten. Tingkat reabilitas data dapat dilihat dengan menggunakan *Cronbach Alpha* (α), apabila *cronbach alpha* > 0,60 atau 60% maka reabilitas pertanyaan bisa diterima.

Analisis Data (Regresi Linier Berganda)

$$Y = \alpha + bx_1 + bx_2$$

Dimana :

- Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
- α = Konstanta
- b = Koefisien Regresi
- X₁ = Kompetensi
- X₂ = Sistem Pengendalian Internal

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *kolmogrov smirnov*. Derajat keyakinan (α) yang ditentukan dalam uji normalitas ini adalah sebesar 5% atau 0,05.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas / *independen*. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Berikut dasar acuannya : Jika nilai *tolerance* > 10 % dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas. Sedangkan jika nilai *tolerance* < 10 persen dan VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain dalam model regresi. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Berikut dasar acuannya : Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur yakni bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah adalah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji-t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau *independent variable* (X) secara

parsial berpengaruh terhadap variabel terikat atau *dependent variable* (Y). Kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut :

Jika nilai signifikansi (sig) $< 0,05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka terdapat pengaruh antar variabel X terhadap variabel Y dan hipotesis diterima.

Jika nilai signifikansi (sig) $> 0,05$ atau $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh antar variabel X terhadap variabel Y dan hipotesis ditolak.

Menurut Sugiono (2018) hasil uji t dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis



Berikut ini adalah kriteria yang digunakan :

- Ho diterima jika $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh positif antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- Ho ditolak jika $t \text{ hitung} \leq -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > +t \text{ tabel}$ maka terdapat pengaruh positif antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi R^2

Gujarati (2003) mengatakan bahwa nilai R^2 dinyatakan dalam persen yang nilainya berkisar $0 < R^2 < 1$, atau dengan kata lain diantara nol dan satu. Berikut ketentuannya : jika nilai R^2 mendekati 0 artinya kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Sedangkan jika nilai R^2 mendekati 1 artinya kemampuan variabel bebas dapat menjelaskan dan memberikan hampir semua informasi yang diperlukan dalam sebuah penelitian terkait variabel terikat.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Objek Penelitian

Kecamatan Besuki adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Memiliki letak wilayah yang sangat strategis dengan letak astronomis $7^{\circ} 43'$ Lintang Selatan $113^{\circ} 41'$ Bujur Timur menjadikan Kecamatan ini memiliki sejarah panjang sebagai salah satu kota penting di Nusantara dibuktikan dengan banyaknya tempat peninggalan bersejarah. Terbagi dalam 10 Desa yaitu Desa Widoropayung, Desa Sumberejo, Desa Jetis, Desa Blimbing, Desa Langkap, Desa Bloro, Desa Pesisir, Desa Kalimas, Desa Besuki, dan Desa Demung. Jumlah penduduk Kecamatan Besuki adalah 65.635 Jiwa dengan rincian 32.025 jiwa laki-laki dan 33.610 jiwa perempuan. Luas Kecamatan Besuki adalah $26,08 \text{ Km}^2$ dengan batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Madura,
- Sebelah Selatan : Kecamatan Jatibanteng dan Kecamatan Sumbermalang,
- Sebelah Barat : Kecamatan Banyuglugur
- Sebelah Timur : Kecamatan Suboh

Analisis Data

Analisis Deskriptif Pernyataan Responden

Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Y (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa)	30	20	25	22,40	1,905
X1 (Kompetensi)	30	35	45	40,10	3,325
X2 (Sistem Pengendalian Internal)	30	20	25	21,83	1,821

Sumber: Lampiran Data Diolah 2021

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui deskripsi umum hasil adalah :

1. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa memiliki nilai minimum sebesar 20 dan nilai maksimum sebesar 25. Nilai rata-rata sebesar 22,40 dengan penyimpangan nilai rata-ratanya yang ditunjukkan melalui standart deviasi sebesar 1,905 dengan jumlah indikator sebanyak 5 pernyataan yang diuraikan dalam point-point perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dimana rata rata untuk jawaban tentang akuntabilitas berada pada pilihan setuju yang artinya responden menyepakati bahwa Akuntabilitas Pengeolaan Dana Desa harus dilaksanakan sebagai wujud pertanggungjawaban secara *vertikal* maupun *horizontal*.
2. Variabel Kompetensi memiliki nilai minimum sebesar 35 dan nilai maksimum sebesar 45. Nilai rata-rata sebesar 40,10 dengan penyimpangan nilai rata- ratanya yang dutunjukkan melalui standart deviasi sebesar 3,325 dengan jumlah indikator sebanyak 9 pernyataan yang diuraikan dalam point-point pengetahuan, kemampuan dan sikap dimana rata-rata untuk jawaban tentang Kompetensi berada pada pilihan setuju yang artinya responden menyepakati bahwa Kompetensi yang baik meliputi pengetahuan, kemampuan, dan sikap harus dimiliki oleh setiap perangkat desa dalam mengelola dana desa.
3. Variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai minimum sebesar 20 dan nilai maksimum sebesar 25. Nilai rata-rata sebesar 21,83 dengan penyimpangan nilai rata-ratanya yang ditunjukkan melalui standart deviasi sebesar 1,821 dengan jumlah indikator sebanyak 5 pernyataan yang diuraikan dalam point-point lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan dimana rata-rata untuk jawaban tentang Sistem Pengendalian Internal pada pilihan setuju yang artinya responden menyepakati bahwa Sistem Pengendalian Internal suatu instansi ataupun pemerintahan harus dijalankan secara baik agar informasi pertanggungjawaban yang dihasilkan semakin berkualitas.

Pengujian Instrumen

Uji Validitas Data

Defree of freedom (df) = n-k, dengan rincian n sebagai jumlah sampel yang digunakan

dan k sebagai jumlah sampel independen yang digunakan. Jadi df yang digunakan $30-2 = 28$ dengan nilai alpha sebesar 5% maka menghasilkan nilai r tabel 0,3610. Jika r hitung > r tabel berarti pernyataan tersebut valid. Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada tabel 4.2 :

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas

No	Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
Y (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa)				
1	Y1	0,592	0,3610	Valid
2	Y2	0,747	0,3610	Valid
3	Y3	0,855	0,3610	Valid
4	Y4	0,764	0,3610	Valid
5	Y5	0,806	0,3610	Valid
X1 (Kompetensi)				
1	X1.1	0,675	0,3610	Valid
2	X1.2	0,578	0,3610	Valid
3	X1.3	0,691	0,3610	Valid
4	X1.4	0,886	0,3610	Valid
5	X1.5	0,886	0,3610	Valid
6	X1.6	0,683	0,3610	Valid
7	X1.7	0,817	0,3610	Valid
8	X1.8	0,603	0,3610	Valid
9	X1.9	0,768	0,3610	Valid
X2 (Sistem Pengendalian Internal)				
1	X2.1	0,800	0,3610	Valid
2	X2.2	0,814	0,3610	Valid
3	X2.3	0,535	0,3610	Valid
4	X2.4	0,833	0,3610	Valid
5	X2.5	0,833	0,3610	Valid

Sumber: Lampiran Data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.2 terlihat nilai r hitung > r tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid.

Uji Reabilitas Data

Untuk melihat tingkat reabilitas suatu data dapat menggunakan *Cronbach Alpha* (α) dengan melihat hasil pada kolom *Cronbach's Alpha If Item Deleted*. Apabila cronbach alpha > 60% atau 0,06 artinya reliabilitas pertanyaan bisa diterima (Ghozali, 2013). Hasil pengujian reabilitas dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini :

Tabel 4.3 Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Koefisien Alpha Cronbach	Keterangan
1.	Y (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa)	0,832	Reliabel
2.	X1 (Kompetensi)	0,867	Reliabel
3.	X2 (Sistem Pengendalian Internal)	0,803	Reliabel

Sumber: Lampiran Data diolah 2021

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa seluruh variabel mempunyai nilai *Cronbach Alpha* (α) > 60% atau 0,06 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini layak digunakan sebagai alat ukur atau disebut reliabel.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan estimasi regresi linier berganda dengan program IBM SPSS diperoleh hasil seperti dibawah ini :

Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi Berganda

No	Variabel	Koefisien Regresi	Standart Error
1.	Konstanta	3,249	2,740
2.	X1 (Kompetensi)	0,261	0,123
3.	X2 (Sistem Pengendalian Internal)	0,397	0,225

Sumber: Lampiran Data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui persamaan regresi yang berbentuk adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 3,249 + 0,261 X_1 + 0,397 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana

DesaX1 = Kompetensi

X2 = Sistem Pengendalian Internal

E = *Standart Error Estimate*

Berkut adalah penjelasan dari persamaan diatas adalah :

- Nilai konstanta sebesar 3,249 menunjukkan bahwa Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal konstan, maka nilai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 3,249 dapat diartikan bahwa rata-rata kontribusi variabel lain diluar model memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas dana desa.
- $b_1 = 0.261$ pada variabel kompetensi, artinya apabila Kompetensi ditingkatkan satu satuan maka Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa akan meningkat sebesar 0,261 satu satuan dengan catatan apabila Sistem Pengendalian Internal konstan.
- $b_2 = 0,397$ pada variabel Sistem Pengendalian Internal, artinya apabila Sistem Pengendalian Internal ditingkatkan satu satuan maka Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa akan meningkat sebesar 0,397 dengan catatan apabila Kmpetensi konstan.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa model yang diperoleh benar-benar memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi yang meliputi asumsi: meliputi terdistribusi dengan normal, tidak terjadi multikolineritas, tidak terjadi heteroskedastisitas dan tidak berlinier.

Uji Normalitas

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas

Unstandardized Residual		
N		30
Normal Parameters^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,12009609
Most Extreme Differences	Absolute	,186
	Positive	,164
	Negative	-,186
Test Statistic		-,186
Asymp. Sig. (2-tailed)		,010 ^c

Sumber : Lampiran Data Diolah, 2021

Berdasarkan data tabel 4.5 hasil uji statistic menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,10 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas

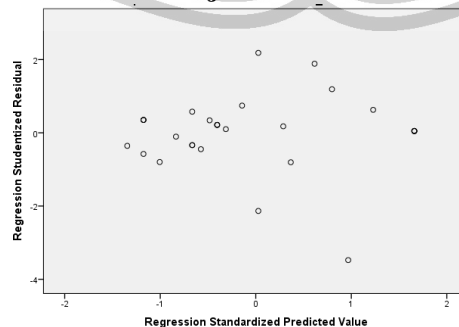
No	Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
1.	Kompetensi (X1)	0,285	3,509	Tidak ada Multikolinearitas
2.	Sistem Pengendalian Internal (X2)	0,285	3,509	Tidak ada multikolinearitas

Sumber : Lampiran Data Diolah, 2021

Berdasarkan data tabel 4.5 hasil uji statistic menunjukkan bahwa nilai tolerance $0,285 > 0,1$ dan nilai VIF $3,509 < 10$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Lampiran Data Diolah, 2021

Gambar 4.7 hasil uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan menunjukkan hasil titik-titik menyebar secara acak dan tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah adalah angka 0 pada sumbu, maka disimpulkan tidak ada heteroskedastisitas. Oleh karena itu dengan kata lain dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini menerima hipotesis homokedastisitas.

Pengujian Hipotesis Penelitian Uji Statistik T

Tabel 4.7 Hasil Uji t dan Koefisien Determinasi (R^2)

No	Variabel	Uji t			Koefisien Determinasi
		Taraf Sig.	Sig. Hitung	t hitung t tabel	
1	Kompetensi (X1)	0,05	0,001	2,127 1,703	0,645
2	Sistem Pengendalian Internal (X2)	0,05	0,001	1,768	

Sumber : Lampiran Data Diolah, 2021

Data tabel 4.8 menunjukkan rincian berikut :

- Variabel Kompetensi (X1) memiliki nilai $t_{hitung} (2,127) > t_{tabel} (1,703)$ dan signifikansi $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara parsial Kompetensi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. T_{hitung} positif, semakin baik kompetensi maka Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa akan meningkat (Studi Empiris di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo).
- Varibel Sistem Pengendalian Internal (X2) memiliki nilai $t_{hitung} (1,768) > t_{tabel} (1,703)$ dan signifikansi $0,001 < 0,05$, maka H_0 dan H_a diterima, artinya secara parsial Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. T_{hitung} positif, semakin baik Sistem Pengendalian Internal maka Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa akan meningkat (Studi Empiris di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)

Koefisien Determinasi R^2

Hasil perhitungan pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai R_{square} sebesar 0,645. Artinya adalah sumbangan pengaruh variabel X1 (Kompetensi) dan variabel X2 (Sistem Pengendalian Internal) terhadap Y (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa) sebesar sebesar 0,645 atau 64,5% sedangkan sisanya sebesar 36,5% dipengaruhi variabel lain.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan dari hasil analisis data kuesioner yang disebarkan kepada perangkat desa di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo adalah :

- Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel X1 (Kompetensi) berpengaruh terhadap variabel Y (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa) di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo ditunjukkan dengan hasil nilai $t_{hitung} (2,127) > t_{tabel} (1,703)$ serta signifikansi $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara parsial Kompetensi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel X2 (Sistem Pengendalian Internal) berpengaruh terhadap variabel Y (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa) di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo ditunjukkan dengan hasil nilai $t_{hitung} (1,768) > t_{tabel} (1,703)$ serta signifikansi $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara parsial Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan terutama yang ditujukan untuk seluruh Perangkat Desa agar dapat menjaga tanggung jawab yang diberikan salah satunya dengan selalu meningkatkan kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa mengingat besaran Dana Desa yang terus meningkat tiap tahunnya dengan cara berkomitmen menjaga Kompetensi yang baik melalui peningkatan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja serta menciptakan Sistem Pengendalian Internal yang baik agar tujuan dapat dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi

Adapun beberapa rekomendasi berdasarkan hasil dan proses penelitian yang telah dilakukan bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mempelajari lebih dalam ruang lingkup objek penelitian dengan cara memperluas dan menambah jumlah responden yang digunakan sehingga mungkin saja hasilnya berbeda.
2. Penelitian selanjutnya direkomendasikan agar dapat menambah variabel lainnya yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti transparansi, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi atau variabel lainnya.
3. Penelitian selanjutnya direkomendasikan agar dapat mendampingi seluruh responden untuk mengisi kuesionernya sehingga informasi yang didapatkan responden lebih tepat dan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76.
- Maria Eni Surasih. (2002). Pemerintah Desa dan implementasinya, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Tjutju, Y. (2008). Suwatno, Manajemen Sumber Daya Manusia.
- Cheng, R. H., Engstrom, J. H., & Kattelus, S. C. (2002). Educating Government Financial Managers: University Collaboration Between Business and Public Administration. *The journal of Government Financial Management*.
- Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 14-25.
- Mualifu, M., Guspul, A., & Hermawan, H. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pasa Seluruh Desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga *Journal of Economic, Business and Engineering* Vol. 1, No. 1, Oktober 2019

- Pratiwi, S. A. (2020). *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Perangkat Desa Dalam Mengelola Dana Desa (DD) (Studi Empiris Di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso)* (p.(Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah J).
- Reynaldi Riantiarno & Nur Azlina. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 3(3), 560–568.
- Rosyidi, M., Azlina, N., & Putra, A. A. (2018). *Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 2018.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 93/PMK.07/2015. (2015). *PMK_93- PMK.07-2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa*
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12). (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*,
- Peraturan Bupati situbondo No. 71 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincisn Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019*. 1965, 1–22.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. (2008). *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. 49(95), 980.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014. (2014). *Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa*
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. (2014). *Desa*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003. Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Undang-Undang No.13 Tahun 2003, 1*, 1–34.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, Imam . 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi, Semarang: Badan Penerbit Universitas